



“PENERAPAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN  
<https://jdih.unpad.ac.id>”



HIBAH INOVASI DAN KREASI  
TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD  
(HIKTU) 2021



Tim Pengusul Proposal:  
- Andy M. Sudartono

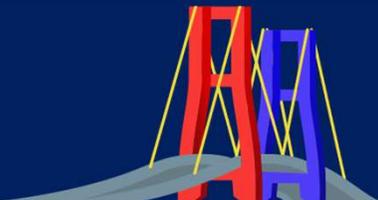
## [LATAR BELAKANG]

- Ketersediaan dokumen hukum yang lengkap dan akurat di Unpad?
- Dokumentasi dan informasi hukum merupakan bahan baku, baik dalam menetapkan dasar menimbang, dasar mengingat (landasan hukum) ataupun dalam penyusunan materi muatan.
- Unpad belum memiliki Wadah Dokumen Hukum yang terintegrasi dari seluruh Fakultas dan Unit Kerja.
- Proses pemencaran dan penyebarluasannya masih bersifat manual dari masing-masing unit kerja/belum terintegrasi.
- Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, adalah berupa penerapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui website yang terintegrasi.



## [TUJUAN DAN MANFAAT]

- Unpad memiliki wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- Tujuan praktisnya adalah agar dokumen dan produk hukum di seluruh unit kerja yang ada di Unpad dapat didistribusikan isi informasinya bagi siapa saja yang membutuhkan untuk dimanfaatkan menurut keperluan masing-masing unit kerja.
- Membantu pejabat di dalam struktur organisasi Unpad untuk bahan pengambilan keputusan, membantu dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan lainnya.
- Website JDIH Unpad ini nantinya memiliki konten primer dan sekunder. Konten primer memuat peraturan yang dikeluarkan oleh instansi Unpad seperti; Peraturan dan/atau Keputusan; Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar (Profesor), Rektor, Senat Fakultas, Dekan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Sedangkan konten informasi sekunder berisi peraturan perundang-undangan tingkat pusat, buku hukum, majalah hukum, artikel, dan dokumen hukum lainnya. Website JDIH Unpad ini nantinya menjadi pusat rujukan peraturan-keputusan yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran
- Pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik.



## Landasan Hukum

- PERMENPANRB No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah tidak lain adalah termasuk kedalam jenis Naskah Dinas Arahan yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan:
  1. Naskah Dinas Arahan
    - a. Naskah Dinas Pengaturan (Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, SOP, dan Surat Edaran)
    - b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)
    - c. Naskah Dinas Penugasan (Instruksi, Surat Perintah, dan Surat Tugas)
  2. Naskah Dinas Korespondensi
    - a. Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas, Memorandum)
    - b. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern
    - c. Surat Undangan
  3. Naskah Dinas Khusus
    - a. Surat Perjanjian Dalam Negeri (MoU, PKS), b. Surat Perjanjian Luar Negeri (MoU, MoA), c. Surat Kuasa, d. Berita Acara, e. Surat Keterangan, f. Surat Pengantar
    - g. Pengumuman, h. Laporan, i. Telahaan Staf, j. Formulir, k. Naskah Dinas Elektronik



## Landasan Hukum di Unpad

- Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Padjadjaran.







Adapun website yang berdomain \*.unpad.ac.id yang mengelola produk hukum ataupun naskah dinas (digital) yang dapat di konsinyir melalui *advance search - google* oleh tim pengusul proposal adalah sebagai berikut:

1. <https://www.unpad.ac.id/arsip-unpad/peraturan/>
2. <https://www.unpad.ac.id/arsip-unpad/>
3. <http://repository.unpad.ac.id/solrsearch/index/search/searchtype/all>
4. <https://kearsipan.unpad.ac.id/peraturan-rektor-4/>
5. <https://fkg.unpad.ac.id/perka-arsip/>
6. <http://www.fk.unpad.ac.id/posts/arsip>
7. <http://tsi.feb.unpad.ac.id/kearsipan/>
8. <https://peteranakan.unpad.ac.id/arsip-2/>
9. <https://fisip.unpad.ac.id/direktori-arsip>
10. [http://akademik.fmipa.unpad.ac.id/direktori\\_peraturan/](http://akademik.fmipa.unpad.ac.id/direktori_peraturan/)



Rencana perbaikan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan secara berjenjang agar Unpad dapat bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk menerapkan JDIH di Unpad serta bergabung kedalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Untuk rencana perbaikan dan solusi tersebut, ketua tim proposal telah berinisiatif berkomunikasi informal pribadi melalui email, whatsapp dan telepon kepada Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan JDIH BPHN Kemenkumham RI (Bpk. Reinal Saputra, SH, MH) pada tanggal 05 April 2021 dalam rangka berkonsultasi mengenai penajakan kerjasama penerapan JDIH di Unpad.
3. Memasang *framework* Website JDIH terbaru yang akan diterapkan pada <https://jdih.unpad.ac.id> dengan menggunakan Content Management System/CMS Indonesian Legal Documentation and Information System versi 3 (ILDIS v3) dengan dukungan php versi 7.2 serta API yang lebih modern dan cocok dengan spesifikasi *engine web server* yang ada di Unpad, serta yang akan diberikan gratis oleh BPHN Kemenkumham RI melalui surat permohonan dari Unpad.

### Admin-Operator Fakultas, Unit Kerja se-Unpad

### Admin Direktorat Tata Kelola, Legal, Komunikasi

- 1. Berhak Tambah/Hapus User dan Admin Fakultas
- 2. Berhak Tambah/Hapus Unit Kerja lainnya
- 3. Membuat restriksi atas informasi yang dikecualikan
- 4. Dapat Memberi Komentar/Masukkan Data yang di input.

CRUD+ (Create, Read, Update, Delete, Print)

Aplikasi  
JDIH  
Unpad

### SUPER ADMIN

- 1. Memelihara Database berkala (back up, merampingkan)
- 2. Memperbaiki, Uji Coba, Trial & Error Aplikasi
- 3. Mengembangkan Menu Baru, Fitur dan Layanan Baru sesuai permintaan (Evolusi Sistem)
- 4. Membuatkan User Admin sesuai permintaan

CRUD+ (Create, Read, Update, Delete, Print)

### USER UMUM \*\*tanpa login

- Melihat Dashboard seluruh dokumen
- Melihat Detail Dokumen

Read & Print

1. INPUT DATA  
Scan PDF, Input Judul, Jenis Dokumen, Tipe Dokumen, Variabel Meta Data Dokumen terkait lainnya

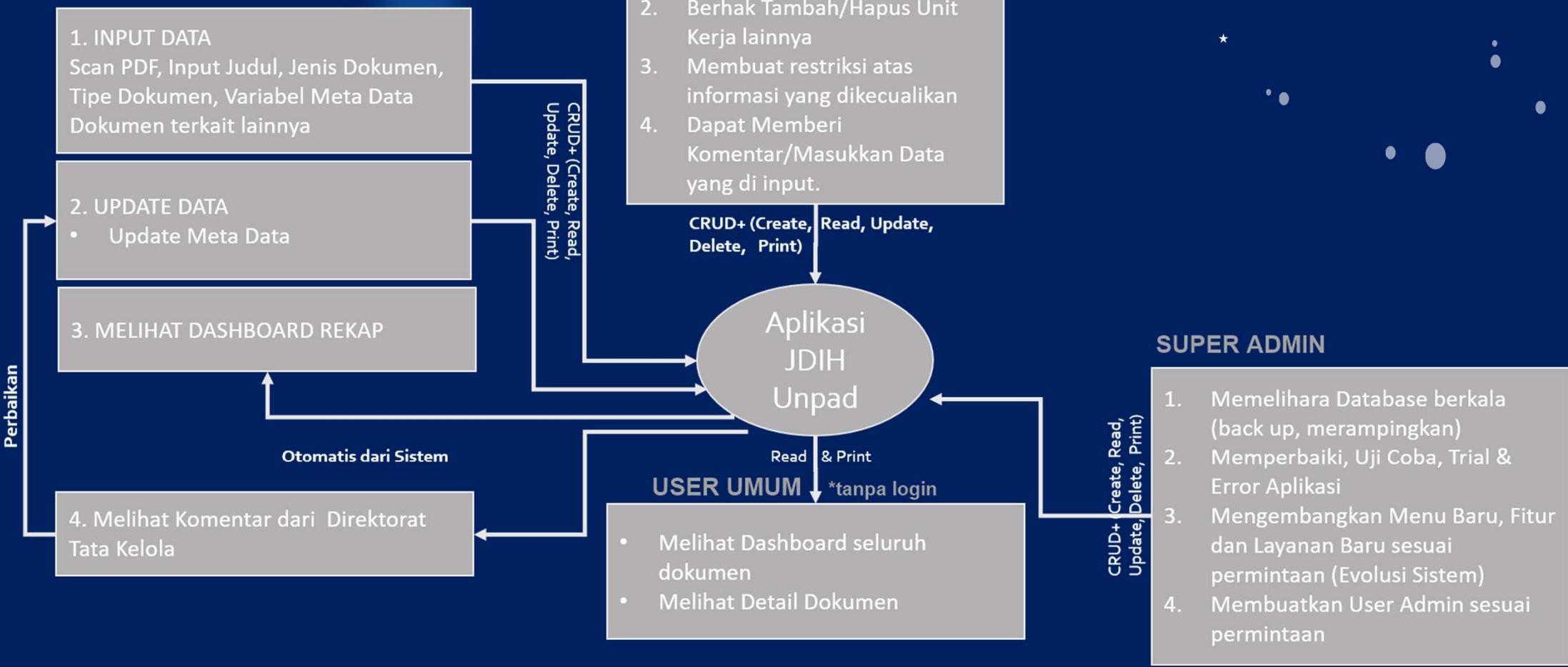
2. UPDATE DATA  
• Update Meta Data

3. MELIHAT DASHBOARD REKAP

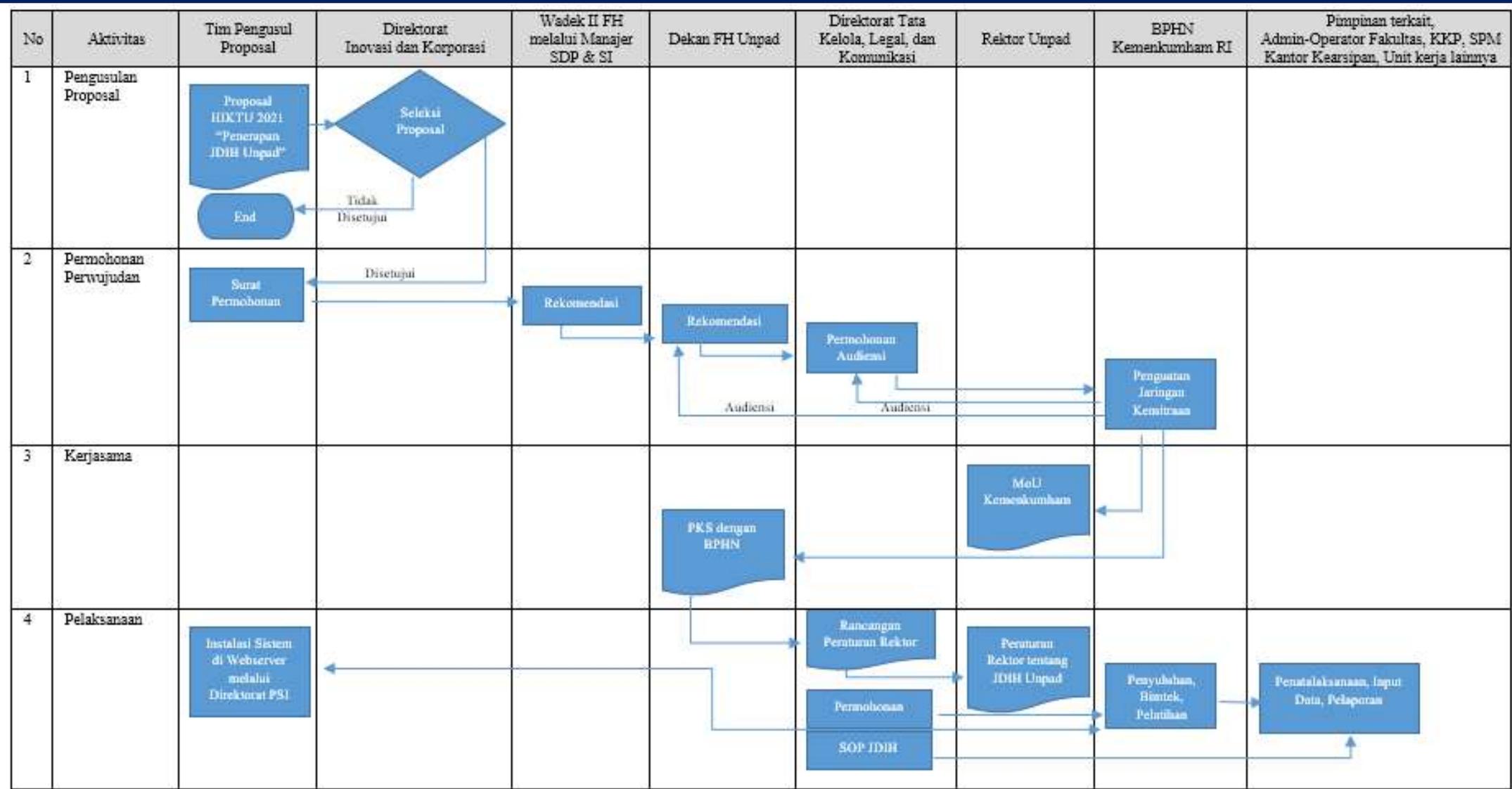
4. Melihat Komentar dari Direktorat Tata Kelola

Otomatis dari Sistem

Perbaikan



## Tahapan pelaksanaan penerapan JDIH Unpad, sebagai berikut:



TERIMA KASIH ATAS KESEMPATAN  
YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI.  
-TIM PENGUSUL PROPOSAL-

